

ANALISIS KESADARAN DAN PARTISIPASI KHALAYAK POLITIK PADA KONTESTASI PEMILIHAN KETUA LINGKUNGAN RW 38 VILLA BEKASI INDAH II

Ilham Zaky Syahrilla¹

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Saeful Mujab²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran politik khalayak dan partisipasi politik khalayak khususnya saat pemilihan Ketua RW 38 untuk masa bakti 2022-2027 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Guna mewujudkan tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan paradigma postpositivisme. Selanjutnya data dihimpun melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan key informan AS, selaku Ketua RW terpilih sebagai, dan 3 (tiga) orang warga selaku informan yaitu informan A, D, dan G. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran politik khalayak RW 038, tampak kesadaran input, masyarakat terlihat sangat menaruh perhatian pada urusan-urusan pemerintahan dan politik. Dan juga pada kesadaran output, masyarakat sadar betul dan merasakan dampak positif pembangunan di Wilayah RW 038, karena kedekatan mereka dengan anggota dewan/ legislatife. Terkait dengan partisipasi politik khalayak RW 038, terdapat kategori apatis, hal ini terlihat ketika calon Ketua RW yang diusung berbeda dengan pilihan politik/ partai politiknya maka sebagian menjadi oposisi dan sebagian tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik yang ada. Kemudian terdapat kategori spectator, terlihat dari masyarakat RW 038 hampir seluruhnya telah ikut dalam kegiatan-kegiatan. Dan juga terdapat kategori gladiator, karena banyak dari warga RW 038 menjadi agen partai politik di lingkungan mereka. Selanjutnya, partisipasi politik khalayak khususnya saat pemilihan Ketua RW untuk masa bakti 2022-2027 kecil, karena hanya 38,7 % khalayak yang berpartisipasi politik.

Kata kunci: kesadaran politik, khalayak politik, partisipasi politik

ABSTRACT

This study aims to determine the public's political awareness and participation, especially during the election of the Head of RW 38 for the 2022-2027 term of service in Sumberjaya Village, Tambun Selatan District and Bekasi Regency. To achieve the research objectives, researchers used qualitative research methods with a post-positivism paradigm. Data were collected through observation, documentation and interviews. Interviews were conducted with the key informant AS, the head of the RW selected as, and 3 (three) residents as informants, namely informants A, D, and G. The results of the study showed that for the political awareness of the RW 038

¹ Ilham Zaky Syahrilla. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jl.Perjuangan No. 1, Marga Mulya, Bekasi Utara.

² Saeful Mujab. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jl.Perjuangan No. 1, Marga Mulya, Bekasi Utara.

saeful.mujab@dsn.ubharajaya.ac.id

audience, there was input awareness, the community seemed to pay a lot of attention to government and political affairs. And also on output awareness, and the community is very aware and feels the positive impact of development in RW 038, because of their closeness to members of the council/legislature. Related to the political participation of the RW 038 audience, there is an apathetic category, this can be seen when the candidate for RW head is different from their political choice/political party, so some become oppositionists and some do not participate and withdraw from the existing political process. Then there is the spectator category, it can be seen from the people of RW 038 that almost all of them have participated in the activities. And there is also the gladiator category, because many of the residents of RW 038 become agents of political parties in their environment. Furthermore, the political participation of the audience, especially during the election of the RW Chairperson for the 2022-2027 term, is small, because only 38.7% of the audience participates in politics.

Key words: political audiences, political awareness, political participation

PENDAHULUAN

Partisipasi politik masyarakat di alam demokrasi menjadi sebuah aspek yang cukup penting. Hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh atas pondasi masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan (Liando 2016). Bentuk dari partisipasi politik itu sendiri adalah sebuah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan memengaruhi kebijakan publik baik secara langsung atau tidak (Priandi and Roisah 2019). Kegiatan dimaksud, mencakup tindakan semisal memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota legislatif, menjadi bagian - anggota dari sebuah partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya (Priandi and Roisah 2019).

McClosky menyatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari warga masyarakat untuk mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (McClosky 1972). Sementara Davis dalam Sastroadmojo menegaskan bahwa partisipasi politik adalah sebagai mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab padanya (Sastroadmojo 1995). Senada dengan Closky dan Bavis, Sitepu berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja maupun tidak sengaja, yang terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan atau dimobilisasi (Sitepu 2012). Dia juga merumuskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikut aktif dalam kehidupan politik, di antaranya dengan memilih pimpinan Negara dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung (Sitepu 2012).

Berdasarkan penjelasan partisipasi politik di atas, tersurat bahwa partisipasi politik mmiliki hubungan erat dengan kesadaran politik, karena ketika kesadaran akan dirinya diperintah, maka dalam penyelenggaraan pemerintah dia menuntut untuk diberikan hak bersuara (Budiardjo 2013). Seseorang yang telah menyadari dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan sistem politik baik dari segi output maupun input maka dianggap memiliki kesadaran politik (Almond and Verba 1984). Input meliputi tuntutan ataupun dukungan dari masyarakat kepada pemerintah, dan output berupa keputusan, tindakan atau hasil kebijakan pemerintah yang

diterapkan (Almond and Verba 1984). Sehingga dalam hal ini, Ramlan Surbakti menekankan bahwa kesadaran politik merupakan salah satu faktor tingginya partisipasi politik. Semakin tinggi tingkat kesadaran politik, maka semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya (Surbakti 2010).

Persoalannya kemudian adalah khalayak politik yang seperti apa yang memiliki kesadaran dan selanjutnya berpartisipasi aktif dalam politik? Hennesy dalam Nasution 1990, membagi khalayak komunikasi politik dalam beberapa lapisan, antara lain, a. *general public* atau publik umum; b. *the attentive public* atau publik yang penuh perhatian; dan c. *the leadership public* atau elit opini dan kebijakan (Nasution 1990). Menurutny semua lapisan tersebut, kalangan yang paling aktif minatnya dalam masalah pemerintahan dan seringkali sebagai pelaku politik adalah elit opini dan kebijakan. Sedangkan lapisan khalayak yang menaruh perhatian terhadap diskusi-diskusi antar elit politik dan seringkali termobilisasi untuk bertindak dalam kaitan suatu permasalahan politik adalah *publik attentive*. Dan lapisan khalayak yang terdiri dari hampir separuh penduduk, yang dalam kenyataannya jarang berkomunikasi dengan para pembuat kebijakan adalah publik umum (Nasution 1990).

Lapisan yang penuh perhatian, merupakan sub-kultur khusus, di mana kelompok-kelompok kepentingan yang merasa berkepentingan dengan masalah kebijakan umum ketimbang. Khalayak yang penuh perhatian terhadap perkembangan yang berlangsung dan menyangkut pemerintahan dan politik, merupakan salah satu faktor yang amat diperlukan bagi terlaksananya sistem politik yang solid. Mereka itulah lapisan masyarakat yang ingin tahu dan menaruh perhatian pada perkembangan keadaan negaranya. Khalayak yang penuh perhatian menempati posisi penting dalam proses opini (Nasution 1990). Dengan demikian terlihat jelas mana khalayak politik yang memiliki kesadaran berpartisipasi aktif dan pasif dalam politik.

Terkait kesadaran khalayak dalam berpartisipasi politik, memikat peneliti ketika melihat partisipasi politiknya di level *grassroots* atau akar rumput, tepatnya pada tingkat Rukun Warga yang sedang menyelenggarakan suksesi kepemimpinan RW. Rukun Warga atau yang sering disebut dengan RW merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa (Indonesia 2014). LKD dalam hal ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan (Indonesia 2014). LKD juga merupakan wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa (Permendagri 2018).

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) paling sedikit meliputi: 1. Rukun Tetangga (RT); 2. Rukun Warga (RW); 3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga; 4. Karang Taruna; 5. Pos Pelayanan Terpadu; dan 6. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Permendagri 2018). Kemudian pada Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa RW memiliki beberapa tugas, yang antara lain: a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan; b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; serta c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa (Permendagri 2018).

Rukun Warga dimaksud dalam penelitian ini adalah RW 038. Sebuah RW yang berada di Perumahan Villa Bekasi Indah 2 RW 038 Desa Sumberjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Masyarakat Perumahan Villa Bekasi Indah 2 RW 038 memiliki dinamika kehidupan berdemokrasi dan pandangan berpolitik yang berbeda. Terdiri dari beragam suku, budaya, dan agama yang kemudian memberikan warna dalam kehidupan

masyarakatnya. Hingar bingar kontestasi Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden Republik Indonesia di tahun 2019, sangat terasa dan memberikan dampak signifikan terhadap suksesi kepemimpinan RW pada saat itu. Masyarakat memiliki kecenderungan terhadap pilihannya saat masa Pemilihan Presiden 2014 dan 2019, pemilihan Ketua RW di tahun 2019, untuk masa bakti 2019-2024 pun terlihat seperti skala mini dari perpolitikan di tanah air. Antar kubu saling berebut pengaruh dan kesadaran berpartisipasi politik terdorong kuat untuk memenangkan calon ketua meraka, meskipun pada akhirnya dimenangkan oleh AP, yang menjadi bagian dari tim sukses partai pemenang dalam pemilu 2019.

Di tengah perjalanan kepemimpinannya, AP tidak lagi dapat melanjutkan kepemimpinannya karena meninggal dunia. Masyarakat dalam hal ini tidak menghendaki kekosongan kepemimpinan, sehingga di tahun 2022 segera digelar pemilihan Ketua RW untuk masa bakti 2022-2027. Lalu bagaimana kesadaran politik khalayak dan partisipasi politik khalayak khususnya saat pemilihan Ketua RW untuk masa bakti 2022-2027? Penelitian ini mencoba menguak pertanyaan tersebut.

LANDASAN TEORI

Istilah partisipasi diambil dari bahasa Inggris, "*participation*", secara umum diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktivitas-aktivitas tertentu (Sitepu 2012). Dalam Kamus Politik, partisipasi adalah ambil bagian; ikut; turut. Istilah ini lebih populer dalam mengartikan ikutnya seseorang atau badan dalam satu pekerjaan atau rencana besar (Marbun 2013) Sehingga partisipasi politik adalah kegiatan seseorang, kelompok, atau organisasi untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Misalnya, ikut pemilu, memengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik (Akbar 2009).

Menurut Davis dalam Sastroadmojo (1995:85) partisipasi politik adalah sebagai mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok atau turut bertanggung jawab padanya (Sastroadmojo 1995). Sementara Huntington mendefinisikan partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang bersifat pribadi dalam memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif maupun tidak efektif (P Huntington and M. Nelson 1977).

Dengan demikian, partisipasi politik dapat dipahami sebagai kegiatan seseorang maupun kelompok untuk ikut aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pimpinan negara serta secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan dimaksud, mencakup tindakan semisal memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*, dan sebagainya (Budiardjo 2013). Sementara itu Maribath dan Goel dalam Rahman membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori (Rahman 2007): 1. Apatitis, yaitu khalayak yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik; 2. Spektator, yaitu khalayak yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilu; 3. Gladiator, yaitu khalayak yang aktif terlibat dalam proses politik, misalnya komunikator, aktifis partai dan aktifis masyarakat; dan 4. Pengkritik, yaitu khalayak yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Terkait dengan kesadaran politik, Kamus Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa kesadaran politik berasal dari kata dasar sadar dan politik. Sadar adalah insaf, merasa, tahu dan mengerti (Nasional 2012). Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti. Dan kesadaran politik bermakna kesadaran dan pengetahuan mengenai kekuatan politik di masyarakat (Nasional 2012). Budiyanto mempertegas bahwa kesadaran politik merupakan sebuah proses batin yang

menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Budiyanto 2006). Ruslan menambahkan bahwa kesadaran politik adalah bentuk-bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik (Ruslan 2000).

Selanjutnya Gabriel Almond dan Sidney Verba mengklasifikasikan 3 (tiga) pola kesadaran politik, yaitu kesadaran *input*, kesadaran *output*, dan penerimaan informasi politik serta perasaan bebas dalam beropini (Almond and Verba 1984). Kesadaran *input* adalah ihwal seseorang dengan sadar terlibat dalam sistem politik dan mengikuti serta menaruh perhatian pada urusan-urusan pemerintahan dan politik. Dalam hal ini berupa dukungan atau tuntutan terhadap sistem politik. Tuntutan *input* dapat muncul dari pengaruh lingkungan atau dalam sistem politik itu sendiri. Dan dukungan *input* menjadi orientasi yang menunjukkan dan mempertahankan sistem politik. Kesadaran *input* dapat diukur dari pemahaman mereka terkait isi pemberitaan politik, sistem pemilu, dan aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Selanjutnya kesadaran *output*, yaitu keadaan seseorang yang dengan sadar merasakan dampak kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam kehidupannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong 2000). Pendekatan deskriptif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Sehingga penelitian ini hanyalah memaparkan sebuah peristiwa, dan tidak mencari atau menjelaskan tentang hubungan, tidak menguji hipotesis dan membuat prediksi.

Pemilihan informan pada penelitian ini dilakukan secara purposive yaitu teknik pengambilan sampel di mana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri ketika memilih anggota populasi untuk berpartisipasi dalam penelitian. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memiliki perbandingan dan penerjemahan saat pengumpulan data dan analisis data (Salim 2001). Key informan pada penelitian ini adalah Ketua RW terpilih untuk masa jabatan 2022-2027 dan informan pendamping terdiri dari 3 (tiga) orang warga masyarakat yang cukup memahami partisipasi politik khalayak di Perumahan Villa Bekasi Indah 2.

Pada penelusuran informasi, peneliti menggunakan teknik *snowball sampling*, yakni penetapan informan diawal, kemudian informasi diperoleh, maka peneliti bisa menetapkan informan lain, dengan mempertimbangkan bahwa informan tambahan tersebut akan memberikan data yang lebih lengkap.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihimpun langsung oleh peneliti dari informan melalui wawancara mendalam. Selanjutnya data sekunder adalah data yang tidak langsung dihimpun dalam bentuk data dan tulisan pada surat kabar, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Data sekunder merujuk pada sumber kepustakaan dan beberapa sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

HASIL

Perumahan Villa Bekasi Indah 2 sebelumnya merupakan bagian dari RW 004, Desa Sumberjaya, melalui Surat Edaran Pemerintah Desa Sumberjaya, Nomor: 470/006/II/2011 pada tanggal 21 Februari 2011 dilakukan pemekaran dan bertambah satu Rukun Warga yaitu RW 038. RW 038 membawahi 5 Rukun Tetangga (RT), yaitu RT 01, RT 02, RT 03, RT 04 dan RT 05, RT-RT tersebut tersebar dalam Perumahan Villa Bekasi Indah 2 Blok J dan Blok K. Bagian Selatan dan Timur, RW 038 berbatasan dengan RW 043, Bagian Barat dan Utara berbatasan dengan RW 042. Warga masyarakat RW 038 menurut AS - key informan, cukup aktif dalam berpartisipasi politik, mereka aktif dalam pemungutan suara baik Pemilihan Umum (Pemilu),

Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), lebih lagi ketika pesta demokrasi dalam rangka pemilihan Ketua RW 038 periode 2022-2027, warga masyarakat sangat antusias menyaksikan acara tersebut (Wawancara, 26/10/2022).

RW 038 memiliki 258 (dua ratus lima puluh delapan) Kepala Keluarga (KK), salah satu warganya merupakan Ketua Komisi III Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II) Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra. Hal ini menjadi pemicu persaingan bagi warga-warga lain yang berbeda pilihan partai politik di satu sisi, dan pemerataan serta pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya terkait infrastruktur di RW 038 lebih diperhatikan di sisi lain. Kemudian, Ketua RW terdahulu merupakan salah seorang warga yang memiliki hubungan dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), bahkan menjadi bagian dari Tim Pemenangan Pemilu dan Tim Sukses Pemilihan Presiden (Pilpres). Untuk Ketua RW Terpilih saat ini, masa bakti 2022-2027, merupakan warga yang memiliki kedekatan dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra).

Perbedaan-perbedaan pilihan partai politik yang ada, tidak menyurutkan bahkan menaikkan kesadaran politik warga RW 038. Perbedaan pilihan partai politik warga RW 038, hampir terdapat di setiap Rukun Tetangga (RT), sebagaimana diterangkan oleh AS:

“....., RT 05 mereka lebih kepada partai PAN dan beberapa ke PKS dan Gerindra, RT 04 juga ada yang ke Gerindra dan ada yang ke PKB dan PDI-P, RT 03, RT 02, dan RT 01 memiliki rata-rata mereka pasti condong kepada partai Gerindra dan PDI-P. Itulah mengapa bagi saya mas di sini pentingnya bagi kita untuk menjadi rukun kembali dalam hidup bermasyarakat disini di RW 038”.

Menilik apa yang disampaikan Hennesy (dalam Nasution 1990), bahwa khalayak komunikasi politik terbagi dalam beberapa lapisan, yang diantaranya adalah, a. publik umum (*general public*); b. publik yang penuh perhatian (*the attentive public*); c. elit opini dan kebijakan (*the leadership public*), maka hampir semua lapisan tersebut ada di RW 038. Namun jika dipresentasikan, *the leadership public* sekitar 5 % (lima persen), *the attentive public* kurang lebih 45 % (empat puluh lima persen) dan *general public* sebanyak 50 % (lima puluh persen). 45 % *the attentive public* yang ada membuat kegiatan dan hiruk pikuk politik di RW 038 sangat terasa. Rujukan pergerakan politik mereka, tidak sebatas pada Desa dan Kabupaten, tetapi lebih jauh kepada perpolitikan Nasional. Hal ini terlihat ketika momen Pemilu dan Pilpres 2019, yang dijadikan kiblat ketika warga RW 038 menyelenggarakan pemilihan Ketua RW. Terjadi dua kubu yang mewakili kedekatan politik calon presiden nomor urut 1 yaitu Ir. Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto, meskipun pada akhirnya dimenangkan oleh AP, yang memiliki kedekatan politik calon presiden nomor urut 1.

Terkait dengan kesadaran politik warga RW 038, dengan meminjam Gabriel Almond dan Sidney Verba, pada kesadaran *input*, masyarakat terlihat sangat menikmati, mengikuti dan atau menaruh perhatian pada urusan-urusan pemerintahan dan politik. Mereka aktif berdiskusi dan berbagi informasi politik yang sedang hangat. Disamping itu mereka aktif mengikuti pemberitaan-pemberitaan politik, update tentang pemilu, dan aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Hal dimaksud sebagaimana disampaikan oleh key informan AS, yakni:

“Untuk masyarakat atau warga di sini di RW 038 mayoritas mereka cukup aktif mas untuk melakukan pemungutan suara pada pemilihan umum ataupun pemilihan-pemilihan suara lainnya yang melibatkan peran mereka untuk menjadi pemilih yang menggunakan hak suara mereka, tempat-tempat pemilihan suara di wilayah RW 038 pun akan terlihat ramai para pemilih mas” (Wawancara, 26/11/2022).

Demikian juga disampaikan oleh informan G, yakni:

“Masyarakat RW 038 ini banyak yang aktif untuk kegiatan pemungutan suara di pemilu, masyarakat terlihat sadar dan memanfaatkan peluang mereka masing-masing untuk memilih dan memperjuangkan atas suara yang mereka pergunakan di pemilu. Dari tahun

ke tahun nya terlihat banget masyarakat sini selalu aktif untuk pemungutan suara, apalagi pemilihan anggota dewan dan pemilihan presiden. Paling keliatan saat Pemilu serentak 2019” (Wawancara, 03/12/2022).

Poin selanjutnya adalah kesadaran *output*, masyarakat sadar betul dan merasakan dampak positif pembangunan di Wilayah RW 038, khususnya atas hasil kerja DPRD II Kabupaten Bekasi, karena dalam hal ini Ketua Komisi III Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah Tingkat II (DPRD II) Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Gerindra secara kebetulan menjadi bagian dari warga RW 038, dan kedekatan waga dengan Anggota Dewan dari Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini sebagaimana di sampaikan oleh AS - key informan:

“..... Kemudian insya Allah nanti kedepannya mas, kita akan melakukan pengecoran jalan juga oleh bapak Dewan Helmi S.E, Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Kabupaten Bekasi dan juga dengan bapak Nanang Kosim, Ketua PAC Tambun Selatan Partai Gerindra, Kabupaten Bekasi. Ya mungkin itu beberapa diantaranya mas, yang memang kegiatan-kegiatannya pun tidak akan berhenti disitu aja tetapi kita akan melaksanakan secara rutin beberapa kegiatan semisal beberapa bulan sekali” (Wawancara, 26/11/2022).

Juga disampaikan oleh informna D:

“Bagi saya yang paling mempengaruhi orientasi berpolitik saya sih melalui apa yang saya dapatkan secara langsung dan saya rasakan mas, selama ini dari dulu sudah banyak saya rasakan dari partai PAN untuk RW 038 dan yang lebih luasnya lagi untuk Kabupaten Bekasi” (Wawancara, 03/12/2022)

Kemudian terkait dengan partisipasi politik, dengan melirik Maribath dan Goel dalam Rahman yang membedakan partisipasi politik menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Apatis, maka terlihat jelas ketika calon Ketua RW yang diusung berbeda dengan pilihan politik/ partai politiknya maka sebagian menjadi oposisi dan sebagian tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik yang ada. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan D:

“Kecenderungan berpolitik saya boleh dikatakan saya lebih cenderung kepada partai PAN. Partai PAN di lingkungan RW 038 terbilang cukup kuat dan bersaing dengan partai Gerindra disini, PDI-P atau PKS mungkin sekarang tidak begitu memiliki *power* di RW 038. Untuk RW yang baru Pak Andi ya, saya tidak memilih beliau sih saat pemilihan ketua RW 038 kemarin mas. Pak Andi ya partai Gerindra, sebelah rumah atau tetangganya saja terlihat sangat partai Gerindra. Jadi ya, orientasi berpolitik pak Andi menurut saya ya ke partai Gerindra” (Wawancara, 03/12/2022).

Kemudian kategori ke 2 adalah Spektator. Pada kategori ini masyarakat RW 038 hampir seluruhnya telah ikut dalam pemilihan umum, baik pemilihan legislative (pileg), pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Selanjutnya adalah kategori Gladiator, pada kategori ini warga RW 038 bisa dikatakan cukup banyak memerankannya. Banyak di antara mereka menjadi agen partai politik, yang tersebar di RT-RT, sebagaimana disampaikan oleh key informan AS:

“....., yang lainnya saya juga sedikit tau mas, RT 05 mereka lebih kepada partai PAN dan beberapa ke PKS dan Gerindra, RT 04 juga ada yang Gerindra dan ada ke PKB dan PDI-P, RT 03, RT 02, dan RT 01 memiliki rata-rata mereka pasti condong kepada partai Gerindra dan PDI-P..... “

Kesadaran dan partisipasi politik khalayak pada RW 038 di permukaan baik-baik saja dan terlihat tidak ada masalah yang berarti, namun hal tersebut tercederai ketika proses pemilihan Ketua RW masa bakti 2022-2027 berlangsung. Pemilihan Ketua RW diikuti oleh 2 (dua) kandidat, yaitu Andi Susiandi dan Iskandar. Andi Susiandi memiliki kedekatan dengan anggota legislatif dan pengurus Partai Gerinda, sementara Iskandar memiliki kedekatan dengan Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), dan pada akhirnya kontestasi dimenangkan oleh Andi Susiandi.

Permasalahan di lapangan adalah, dari 258 Kepala Keluarga, hanya 100 Kepala Keluarga yang bisa berpartisipasi dalam pemilihan Ketua RW tersebut. Sehingga hanya 38,7 % (tiga puluh delapan koma tujuh persen) warga yang berpartisipasi politik. Dengan berbagai alasan dimunculkan oleh panitia penyelenggara, seperti kendala dana untuk pemilihan, d.l.l. yang pada intinya tidak berdasar. Dari sini kemudian muncul konflik di masyarakat, seperti Iskandar dan pendukung tidak berkenan menerima kekalahannya, d.l.l. Hingga penelitian ini disusun, dan publish belum ditemukan penyebab yang pasti (logis) dari minimnya partisipasi politik khalayak pada kontestasi pemilihan Ketua RW tersebut. Lalu bagaimana panitia mengesahkan suara yang ada, padahal partisipasi politik kurang dari 50%, pun belum ditemukan jawabannya.

Hal ini yang kemudian mematahkan statemen Ramlan Surbakti bahwa faktor tingginya partisipasi politik salah satu adalah kesadaran politik, semakin tinggi tingkat kesadaran politik, maka semakin tinggi tingkat partisipasi politiknya. Warga RW 038 kesadaran politiknya cukup tinggi, namun karena tidak difasilitasi dengan baik dalam ajang kontestasi pemilihan Ketua RW, maka partisipasi politik mereka menjadi rendah.

SIMPULAN/CONCLUSION

Kesadaran politik khalayak RW 038, tampak pada kesadaran input, masyarakat terlihat sangat menaruh perhatian pada urusan-urusan pemerintahan dan politik. Dan juga pada kesadaran output, masyarakat sadar betul dan merasakan dampak positif pembangunan di Wilayah RW 038, karena kedekatan mereka dengan anggota dewan/ legislatif. Terkait dengan partisipasi politik khalayak RW 038, terdapat kategori apatis, hal ini terlihat ketika calon Ketua RW yang diusung berbeda dengan pilihan politik/ partai politiknya maka sebagian menjadi oposisi dan sebagian tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik yang ada. Kemudian terdapat kategori spectator, terlihat dari masyarakat RW 038 hampir seluruhnya telah ikut dalam pemilihan umum, baik pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Dan juga terdapat kategori gladiator, karena banyak dari warga RW 038 menjadi agen partai politik di lingkungan mereka. Selanjutnya, partisipasi politik khalayak khususnya saat pemilihan Ketua RW untuk masa bakti 2022-2027 kecil, karena hanya 38,7 % khalayak yang berpartisipasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Kaelola. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Almond, Gabriel, and Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik: Tingkah Laku Politik Dan Demorasi Di Lima Negara*. Penerjemah Sahat Simamara. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. I. Jakarta: Erlangga.
- Indonesia, Republik. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta.
- Liando, Daud M. 2016. "Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)." *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* 3(2):14–28.
- Marbun, B. N. 2013. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- McClosky, Herbert. 1972. *Political Participation*, "International Encyclopedia of the Social Sciences". II. New York: The Macmillan Company.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Nasional, Departemen Pendidikan. 2012. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat."
- Nasution, Zulkarnaen. 1990. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*. Jakarta: Yudhistira.

- P Huntington, Samuel, and Joan M. Nelson. 1977. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Permendagri, RI. 2018. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa." 1–11.
- Priandi, Rizki, and Kholis Roisah. 2019. "Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1(1):106.
- Rahman, H. A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ruslan, Usman A. Muis. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.
- Salim, Agus. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sastroadmojo, S. 1995. *Partisipasi Politik*. Semarang: IKIP Semarang Pers.
- Sitepu, P. A. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.